

Mengapa Anggaran Besar Tidak Menyelesaikan Masalah Publik?

Reformasi Belanja Negara Berbasis Dampak untuk Indonesia yang Lebih Efektif

Peningkatan anggaran belum otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Disusun oleh:
Prof. Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph.D.
Guru Besar Kebijakan dan Governansi Publik
Politeknik STIA LAN Bandung



Scan untuk mengakses materi pendukung kebijakan ini

POLICY BRIEF 1 APRIL 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

AKAR MASALAH

- Anggaran meningkat tetapi outcome pembangunan lambat
- Belanja masih berorientasi serapan, bukan dampak
- Evidence-based policy belum optimal
- Fragmentasi antar lembaga
- Kapasitas daerah belum merata

MENGAPA STRATEGIS?

- Menentukan efektivitas APBN/APBD
- Mempengaruhi legitimasi negara
- Mendukung Indonesia Emas 2045
- Mengurangi ketimpangan sosial

SOLUSI UTAMA

- 1 Outcome-based budgeting
- 2 National evidence policy platform
- 3 Strategic spending review
- 4 Capacity strengthening daerah

SIAPA YANG BERTINDAK?

- Kementerian Keuangan • Bappenas • Kemendagri
- LAN RI • Pemerintah Daerah • DPR RI

“ Anggaran besar bukan jaminan keberhasilan. Yang menentukan adalah kualitas kebijakan, kapasitas institusi, dan orientasi pada dampak bagi masyarakat.”

1

2 FAKTA & ANALISIS MASALAH

A. FAKTA & EVIDENCE

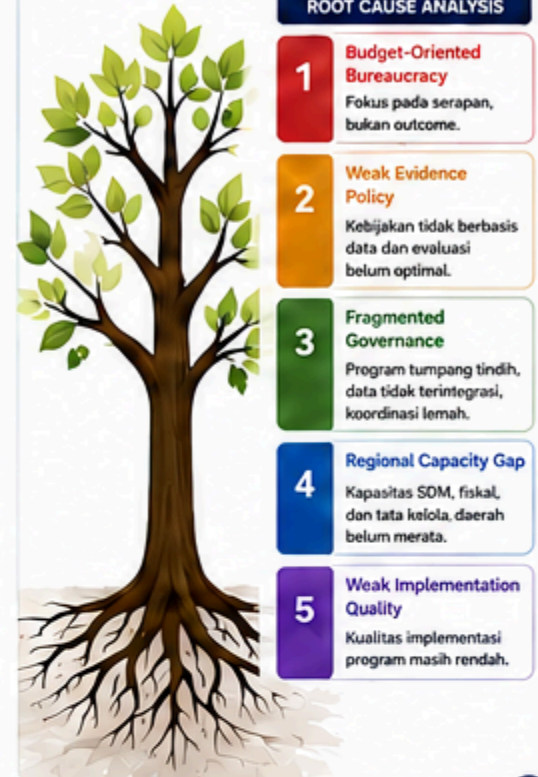


“ Spending is necessary, but not sufficient. ”
(OECD, 2024)

C. DAMPAK YANG TERJADI



B. MENGAPA KEBIJAKAN TIDAK BERDAMPAK?



2

3 SOLUSI KEBIJAKAN & ROADMAP IMPLEMENTASI

A. REFORMASI BELANJA BERBASIS DAMPAK



B. ROADMAP IMPLEMENTASI



✓ Fokus pada Dampak • Berbasis Data • Tepat Sasaran • Akuntabel • Berkelanjutan

3

4 DAMPAK STRATEGIS, PEMANGKU KEPENTINGAN & AJAKAN BERTINDAK

A. DAMPAK YANG DIHARAPKAN



B. SIAPA YANG HARUS BERTINDAK?



C. PESAN KUNCI

“ Anggaran besar bukan jaminan keberhasilan. Yang menentukan adalah kualitas kebijakan, kapasitas institusi, dan orientasi pada dampak bagi masyarakat. ”

– Prof. Septiana Dwiputrianti

DAFTAR PUSTAKA & SUMBER DATA

1. Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah Tahun 2018–2023. Jakarta: BPS RI.
2. Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase Penduduk Miskin (PO) Tahun 2013–2023. Jakarta: BPS RI.
3. Kementerian Keuangan RI. (2024). Nota Keuangan dan APBN Tahun 2024. Jakarta: Kemenkeu RI.
4. Kementerian Keuangan RI. (2025). Nota Keuangan dan APBN Tahun 2025. Jakarta: Kemenkeu RI.
5. Opanatim, S., Kadzir, M., Ashad, R., & Lee, H. K. (2025). Measuring the efficiency of digitalisation in the public sector: the case of Indonesia. *Journal of Management Information Systems*, 11(1), 100–128.
6. Dwiputrianti, S., Stroplele, S. T., L. Edin, M., & Anggrayan, S. (2025). Strategic organization transformation human and capital through Digital Strategy. (111). *Government of International Journal of Management Science and Business Administration*, 10(1), 100–128.
7. Finnantubun, M., Kalf, C., & Blasibluen, T. (2025). Too Grwoto Pohlucose, Tahua, and Regulation, Regulation & Governance, 18(7), 637–654.
8. Zolait, K. G., Voon Yuan, K., Khan, N. U., & Han, H. (2025). Institutional Collaborative Governance and Public Service Delivery, Humanities and Social Science Communications, 10(1).
9. LAN RI. (2025). Penguatan Evidence-Based Policy dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

4